Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi

Fitria, Helmi, Syamsir
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Implementasi kebijakan pengembangan taman dalam melestarikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi dan menganalisis Bentuk strategi kebijakan pengembangan taman dalam penataan ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bentuk Kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2) bahwa: pemerintah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. kekurangan Ruang Terbuka Hijau salah satunya disebabkan oleh jumlah taman yang belum memadai. Pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 bahwa luas taman 875,90 hektar atau sekitar 4,99% sedangkan yang ada pada saat ini (eksisting) 91,63 hektar atau 0,52%. Maka dari itu kekurangan taman di kota Jambi 784,27 hektar atau 4,47%, masih sangat jauh dari yang tercantum di Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 dan kebijakan pengembangan taman menjadi salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Jambi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Pengembangan Taman

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Pasal 1 angka (1) bahwa: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kerusakan lingkungan terjadi di desa maupun di kota. Tekanan penduduk desa menyebabkan lahan digunakan sebagai tempat pemukiman penduduk, begitu juga di kota. Urbanisasi disebutkan sebagai hasil dua kekuatan besar, yaitu pada satu pihak dorongan dari desa dan pada lain pihak tarikan dari kota. Dorongan dari desa ialah kepadatan penduduk yang melampaui daya dukung lingkungan sehingga pangan tidak mencukupi dan lingkungan mengalami kerusakan.

Setiap ada pembangunan di kota, lahan pertanian, kebun buah-buahan atau lahan bervegetasi menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan penduduk kota memerlukan lingkungan yang asri. Miller mengemukakan:

“Bangunan beton dan jalan aspal menyerap panas sepanjang hari dan melepaskannya dengan lambat pada malam hari.”¹

Pusat kota tidak hanya lebih panas dari pinggir kota tetapi juga kurang nyaman, mengandung banyak polusi, kurang sinar matahari, kurang angin dan kelembapannya rendah. Penduduk kota berhak mendapat lingkungan yang nyaman, sehat dan estetik. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas penghijauan kota dengan

menyediakan Ruang Terbuka Hijau. Adapun bagian dari Ruang Terbuka Hijau yaitu Hutan Kota, Taman, Sempadan Danau, Sempadan Sungai, Makam, Kawasan Perkantoran Pemerintah, Fungsi tertentu (sabuk hijau), fungsi tertentu (lahan pertanian perkantoran), Jalur Hijau dan Pedestrian.

Pengembangan dan peningkatan struktur RTH akan meningkatkan fungsinya dan sekaligus meningkatkan keanekaragaman flora dan fauna. Namun ketersediaan lahan untuk RTH semakin bersaing dengan sektor pembangunan lainnya. Sebaliknya sejalan dengan kemajuan iptek, Ruang Terbuka Hijau (RTH) terus ketinggalan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang tidak terbangun yang ada dalam suatu kawasan. Kawasan dimaksud dapat merupakan kawasan perkampungan, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan seterusnya. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan sesama warga. Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanaman-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau.ⁱⁱ Keberadaan ruang terbuka penting artinya bagi dinamika masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa: Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.”

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menjelaskan bahwa: Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dibagi menjadi dua yaitu RTHKP Publik dan RTHKP privat.

RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.ⁱⁱⁱ

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebanyak 20% dari alokasi merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik, artinya Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan pengelolaannya diatur oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan 10% sisanya dimiliki oleh pribadi/privat. Di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 diatur mengenai kebutuhan ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah Kota Jambi terdapat dalam Pasal 47 angka (1) yaitu; Rencana ruang terbuka hijau kota sebagaimana tertulis dalam Pasal 47 huruf c, direncanakan dengan luas kurang lebih 5.381,79 Ha (Lima ribu tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh sembilan hektar) terdiri atas ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 1.764,29 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua sembilan hektar); dan ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20% dari luas kota dengan luas kurang lebih 3.617,50 Ha (Tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh hektar).

Setiap ada pembangunan di kota, lahan pertanian, kebun buah-buahan atau lahan bervegetasi menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan penduduk kota memerlukan lingkungan yang asri. Penduduk kota berhak mendapat lingkungan yang nyaman, sehat dan estetis. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas penghijauan kota dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau. Adapun bagian dari Ruang Terbuka Hijau yaitu Hutan Kota, Taman, Sempadan Danau, Sempadan Sungai, Makam, Kawasan Perkantoran Pemerintah,

Fungsi tertentu (sabuk hijau), fungsi tertentu (lahan pertanian perkantoran), Jalur Hijau dan Pedestrian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menjelaskan bahwa: Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dibagi menjadi dua yaitu RTHKP Publik dan RTHKP privat. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebanyak 20% dari alokasi merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik, artinya Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan pengelolaannya diatur oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan 10% sisanya dimiliki oleh pribadi/privat

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Kota Jambi dengan luas mencapai 17,553 hektar membutuhkan ruang terbuka hijau publik minimal 3.510,60 hektar dan ruang terbuka hijau privat minimal 1.755,30 hektar maka dari itu Kota Jambi masih kekurangan ruang terbuka hijau publik sebanyak 2.220,13 hektar dan ruang terbuka hijau privat sebanyak 774,36 hektar. Hal ini membuktikan, Kota Jambi masih belum memenuhi 30% ruang terbuka hijau sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Namun fokus penelitian ini adalah taman di Kota Jambi saja yang merupakan salah satu bagian dari RTH. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi bahwa luas taman 875,90 hektar atau sekitar 4,99% sedangkan yang ada pada saat ini (eksisting) 91,63 hektar atau 0,52%. Maka dari itu kekurangan taman di kota Jambi 784,27 hektar atau 4,47%, masih sangat jauh dari yang tercantum di Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 dan kebijakan pengembangan taman menjadi salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman perlu meningkatkan kinerja dalam pengembangan taman di kota Jambi sebagai pelestarian ruang terbuka hijau. Namun berdasarkan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi yang baru sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Perangkat Daerah akan dilakukan penghapusan dan penggabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk salah satunya adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman. Pada bulan Januari 2017 Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah bergabung dan berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Implementasi kebijakan pengembangan taman dalam melestarikan Ruang Terbuka Hijau di kota Jambi
2. Bagaimana Bentuk strategi kebijakan pengembangan taman dalam penataan ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup karena masalah pengembangan taman sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup bidang Ruang Terbuka Hijau. Namun peneliti juga akan mencari data tambahan dari Bappeda karena Badan tersebut juga turut berperan dalam persoalan pelestarian Ruang Terbuka Hijau karena masalah ini tidak dapat diatasi oleh Dinas Lingkungan Hidup saja.

2.2. Bentuk dan spesifikasi dan Pendekatan Penelitian

- 1) Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara rinci tentang Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi.
- 2) Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi.

2.3. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Penelitian lapangan (*Field Research*)
Untuk mendukung dari hasil penelitian kepustakaan di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian di lapangan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat kongkrit yang merupakan data primer yang penting dalam mendihlmkan masalah.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang diambil inti sarinya sebagai data sekunder, sehingga diperoleh suatu kerangka dasar atau landasan teoritis guna mengetahui da memahami persoalan yang dibahas.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen berikut sebagai pengumpulan data:

- 1) Wawancara
Merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian empiris. Kemudian jawaban yang diperoleh akan menjadi data yang akan dilengkapi dengan menggunakan teknik lain.
- 2) Observasi Lapangan

Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati perkembangan taman di Kota Jambi.

3) **Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Bentuk Implementasi Kebijakan Pengembangan Taman terhadap Pelestarian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi*

Dalam mengevaluasi terhadap Implementasi kebijakan pengembangan taman sebagai upaya pelestarian RTH menggunakan teori dari Jones bahwa implementasi kebijakan meliputi beberapa tahap yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Pengorganisasian mencakup beberapa hal yaitu pelaksanaan kebijakan, penetapan tata kerja, penetapan manajemen pelaksanaan, kewenangan implementor, serta teknik koordinasi. Kebijakan meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bidang RTH dan dibantu oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Bappeda).

Penetapan tata kerja berpedoman pada Perda dan pelaksanaannya berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dan arahan pimpinan. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan pengembangan taman dilakukan secara struktural (struktur organisasi). Kewenangan dalam hal pengembangan taman ini adalah Bidang Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi. Teknik koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan, koordinasi yang dilakukan yaitu mengadakan rapat koordinasi melalui wadah BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah).

Pengorganisasian tahap implementasi kebijakan yaitu interpretasi. Interpretasi meliputi beberapa hal antara lain kegiatan mengkomunikasikan kebijakan, arah tujuan sasaran kebijakan, dan menginterpretasikan kebijakan. Tahap implementasi interpretasi kebijakan antara lain kegiatan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan kebijakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033 yaitu sosialisasi dan rapat koordinasi dengan pihak terkait.

Arah tujuan sasaran kebijakan juga menjadi bagian interpretasi kebijakan, hal ini penting karena menyangkut target yang akan dicapai dari formulasi kebijakan. Arahan kebijakan adalah pemanfaatan ruang wilayah yang berpedoman pada rencana struktur pola ruang agar tercapai target luas ruang terbuka hijau 30%. Bagian penting dari interpretasi kebijakan adalah menginterpretasi kebijakan, untuk menginterpretasi kebijakan tata ruang pelaksanaannya masih tergantung arahan pimpinan dan tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing.

3.2. *Bentuk strategi kebijakan pengembangan taman dalam penataan ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi*

Kebijakan umum berupa peraturan daerah itu sendiri, teknik operasional berupa kewenangan bidang ruang terbuka hijau untuk melaksanakan kebijakan secara teknis. Aplikasi juga salah satu tahap dalam implementasi. Aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realisasi. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa program yang telah disusun dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu peningkatan ruang terbuka hijau yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan taman sebagai upaya pelestarian RTH di Kota Jambi beberapa kriteria yang digunakan adalah;

- 1) **Komunikasi**
Komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Kebijakan Pengembangan Taman sebagai Pelestarian Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Bappeda Kota Jambi. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi juga melakukan sosialisasi kepada Kantor atau Dinas di Kota Jambi mengenai pentingnya ruang terbuka hijau dan supaya setiap kantor menerapkan *roof garden*. Namun dalam hal ini bahwa bentuk kebijakan ini masih belum terlaksana dengan baik dan secara keseluruhan dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sendiri pun belum menerapkan *roof garden* ini di kantor mereka. Masyarakat juga turut membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan melakukan komunikasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yaitu melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bahwasanya apabila ada lahan kosong yang dapat digunakan sebagai kawasan pembuatan taman.
- 2) **Sumber Daya**
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor keberhasilan proses implementasi. Namun hal ini belum bisa dikatakan baik mengingat Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sendiri belum siap secara sumber daya manusia dalam menerapkan *roof garden*. Karena sampai sekarang *roof garden* itu belum ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Selain sumber daya manusia, sumber daya financial juga turut membantu dalam proses implementasi. Sejauh ini anggaran yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berjalan dengan lancar. Anggaran ini sendiri adalah dari hasil APBD Kota Jambi.
- 3) **Disposisi**
Disposisi implementor adalah kecenderungan sikap maupun pemahaman yang dimiliki oleh implementor yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sendiri sudah mengerti memberikan respon baik terhadap kebijakan ini dan sejauh ini Kepala Dinas dan Kepala Bidang RTH sudah mengerti tujuan dari kebijakan ini. Dalam memenuhi 875,90 hektar taman di Kota Jambi, Kepala Dinas sendiri melakukan evaluasi setiap harinya untuk melihat sejauh mana kemajuan pengembangan taman dan ikut mengidentifikasi wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk pembangunan taman.
- 4) **Struktur Birokrasi**
Struktur birokrasi bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Mekanisme implementasi biasanya ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan guna meningkatkan kinerja struktur birokrasi untuk dilaksanakan para pelaksana kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan arahan kepada masing-masing bidang salah satunya bidang Ruang Terbuka Hijau, untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun sampai saat ini Bidang Ruang Terbuka Hijau tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini membuktikan kinerja Bidang Ruang Terbuka Hijau tidak diatur dalam SOP hanya berlandaskan tugas dan fungsi pokok. Sedangkan untuk struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup efektif karena sudah dilakukan pembagian kerja sesuai dengan bidang dan tidak ada tugas yang seolah-olah tumpang tindih. Untuk prosedur pelaksanaan Perda dalam pemenuhan luas ruang terbuka hijau semua sudah ada di tugas pokok dan fungsinya.

Dalam tahap implementasi kebijakan ini berbagai masalah muncul, yang pertama terhambat oleh kepemilikan taman dan lahan itu sendiri apakah taman dan lahan tersebut milik Kota atau Provinsi dan lahan di Kota Jambi yang jumlahnya terbatas ditambah lagi pemerintah kota yang harus bersaing dengan developer/pengembang, yang kedua kurangnya lahan di Kota Jambi mengingat penduduk yang semakin bertambah, yang ketiga taman di kota sendiri juga belum sepenuhnya dikatakan taman dimana yang dikatakan taman harus memiliki sarana prasarana olahraga, tempat bermain dan WC/Toilet.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bidang RTH. Kewenangan dalam hal pengembangan taman ini adalah Bidang Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi. Arahan kebijakan berpedoman pada rencana struktur pola ruang agar tercapai target luas ruang terbuka hijau 20% untuk publik. Interpretasi kebijakan tata ruang pelaksanaannya masih tergantung arahan pimpinan dan tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing. Kebijakan umum berupa peraturan daerah itu sendiri, teknik operasional berupa kewenangan bidang RTH untuk melaksanakan kebijakan secara teknis. Aplikasi dalam implementasi kebijakan bahwa telah disusun dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu peningkatan ruang terbuka hijau yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi belum dikatakan sukses dalam implementasi kebijakan pengembangan taman sebagai pelestarian Ruang Terbuka Hijau ini dimana kantor mereka sendiri pun belum menerapkan *roof garden* atau atap taman. Implementasi kebijakan pengembangan taman juga terhambat pada lahan Kota yang terbatas, pemerintah Kota Jambi yang bersaing dengan developer /pengembang dalam pembelian lahan, begitu juga dengan status kepemilikan lahan serta taman yang sebagian lahan di Kota Jambi dimiliki oleh pihak Provinsi Jambi.

Bentuk dari kebijakan Pengembangan taman yaitu *roof garden* atau atap hijau di kantor-kantor, *land banking* (pengadaan lahan) dan bangunan berbentuk vertikal (bertingkat) untuk mensiasati lahan kota yang terbatas dengan adanya *vetikal garden*. Namun perlu dikeluarkannya aturan kebijakan seperti Surat Edaran yang digunakan sebagai dasar guna melaksanakan kebijakan pengembangan taman sebagai pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Jambi.

4.1. Saran

Sebaiknya Pemerintah Kota Jambi perlu mengeluarkan aturan kebijakan seperti Surat Edaran yang digunakan sebagai dasar guna melaksanakan kebijakan pengembangan taman sebagai

pelestarian ruang terbuka hijau di Kota Jambi. Dan Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi harus ikut menerapkan kebijakan *roof garden* di kantor mereka. Karena pembuatan *roof garden* ini masih hanya dilakukan oleh Bappeda dan sebaiknya dilengkapinya atau dilakukan pembaharuan terhadap taman-taman di Kota Jambi dengan menambah WC, tempat duduk, tempat bermain, karena taman-taman di Kota Jambi masih banyak yang belum memenuhi kriteria sebagai taman namun hanya sebagai taman-tamanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Djama'an Satori dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2016. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- H. Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Johan Iskandar. 2001. *Manusia Budaya dan Lingkungan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Otto Soemarwoto. 1991. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Robinson Tarigan. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Samodra Wibawa. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukamto Satoto. 2004. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hangar Kreator.
- Zoer'ainiDjamal Irwan. 2005. *Tantangan Lingkungan & Lansekap Hutan Kota*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH)*.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 *Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi*.

KAMUS

- Poerwadarminta W.J.S. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

JURNAL

Freska Ilmijayanti dan Diah Intan Kusumo Dewi, “*Persepsi Pengguna Taman Tematik Kota Bandung Terhadap Aksesibilitas dan Pemanfaatannya*”, Jurnal, Ruang, Semarang, Januari 2015.

Gita Widhaswara, Kismartini dan Rengga Aloysius, “*Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Semarang*”, Jurnal, Semarang, 2015.

Nadia Astriani, “*Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Di Jawa Barat*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, Bandung, April-Juni 2014.

Nadia Imansari dan Parfi Khadiyanta. 2015. *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang*. Vol. 1 No.3. diambil dari: ejournal2.undip.ac.id, (31 juli 2017).

Noor Kholid Ismail, Samsudin. 2014. *Evaluasi Fungsi Taman Kampus Edu Park Universitas Muhammadiyah Surakarta Sebagai Open Space Kampus*. Vol. 14 No. 2. diambil dari: journals.ums.ac.id, (31 juli 2017).

Santoso, Budi, Retna Hidayah, Sumardjito. 2012. *Menggambarkan Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Kampung Plemburan RW 25 Sariharjo Ngaglik*. Vol. VIII No.1. diambil dari: journal.uny.ac.id, (27 januari 2017).

Footnote

ⁱ Abdul Latif, H., *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregele) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 8.

ⁱⁱ Budi Santoso, Retna Hidayah, dan Sumardjito, “Menggambarkan Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Kampung Plemburan RW 25 Sariharjo Ngaglik”, *Jurnal*, Yogyakarta, Mei 2012, hlm. 1.

ⁱⁱⁱ *Ibid.* hlm. 6.